

Readiness for E-Government Implementation at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of the South Sulawesi Provincial Government

Kesiapan Implementasi E-Government Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Maidah

Politeknik STIA LAN Makassar

dhida15@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the level of readiness for e-government implementation at the Regional Financial and Asset Management Agency of the South Sulawesi Provincial Government. The research method used is a qualitative research method with a descriptive qualitative approach to determine how e-government implementation at the Regional Financial and Asset Management Agency of the South Sulawesi Provincial Government. The analytical methods used consist of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study categorize e-government implementation at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of South Sulawesi Province as quite ready but not yet optimal. Key advantages include core applications (SIMAKDA, SIPD, and SIMBADA) that are relatively easy to use, an official portal that provides information transparency, and support and incentives for employees to improve their ICT skills. However, many challenges remain. These include misaligned policies at the central and regional levels, a shortage of IT personnel, network instability in some OPDs, and inadequate data security systems. These conditions cause problems such as delays in digital public services, low data integration efficiency, cybersecurity risks, and problems in maintaining service sustainability. Therefore, to enable BPKAD to achieve more efficient, secure, and sustainable digital government standards, improvements in infrastructure, regulations, and human resource capacity are required.

Keywords: Knowledge Management Implementation, E-Government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesiapan implementasi e-government pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana implementasi e-government pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Implementasi e-government pada BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan dikategorikan sebagai cukup siap tetapi belum optimal. Keunggulan utama termasuk aplikasi inti (SIMAKDA, SIPD, dan SIMBADA) yang relatif mudah digunakan, portal resmi yang memberikan keterbukaan informasi, dan dukungan dan insentif kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan ICT mereka. Namun demikian, banyak tantangan masih dihadapi. Ini termasuk kebijakan yang tidak selaras di tingkat pusat dan daerah, kekurangan tenaga IT, ketidakstabilan jaringan di beberapa OPD, dan sistem keamanan data yang tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan masalah seperti keterlambatan layanan publik digital, rendahnya efisiensi integrasi data, risiko keamanan siber, dan masalah dalam menjaga keberlanjutan layanan. Oleh karena itu, untuk memungkinkan BPKAD mencapai standar pemerintahan digital yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan infrastruktur, regulasi, dan kapasitas SDM.

Kata Kunci: Manajemen Pengetahuan Implementasi, E-Government

1. Introduction

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan *E-government*, yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan *E-government* di Indonesia telah dimulai sebelum Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan jaringan telepon. Pemerintah menyadari manfaat *E-government* dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *E-government* diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan, daya tanggap, dan akuntabilitas pemerintah. Inisiatif *E-government* di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika.

Meskipun potensi *e-government* sangat besar dan berbagai inisiatif telah diluncurkan di tingkat nasional, implementasinya di lapangan masih menghadapi beragam tantangan yang perlu dievaluasi secara mendalam. Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2020, rata-rata indeks SPBE untuk Pemerintah Daerah secara nasional adalah 2,63 (skala 1-5), yang mengindikasikan bahwa implementasi SPBE, termasuk digitalisasi layanan, masih memerlukan peningkatan. Lebih lanjut, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2024) mencatat bahwa dari 560 instansi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, baru 243 instansi yang telah menerapkan arsitektur SPBE, yang berarti masih terdapat 317 instansi yang belum terintegrasi. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa tingkat adopsi dan integrasi sistem digital di berbagai daerah masih beragam.

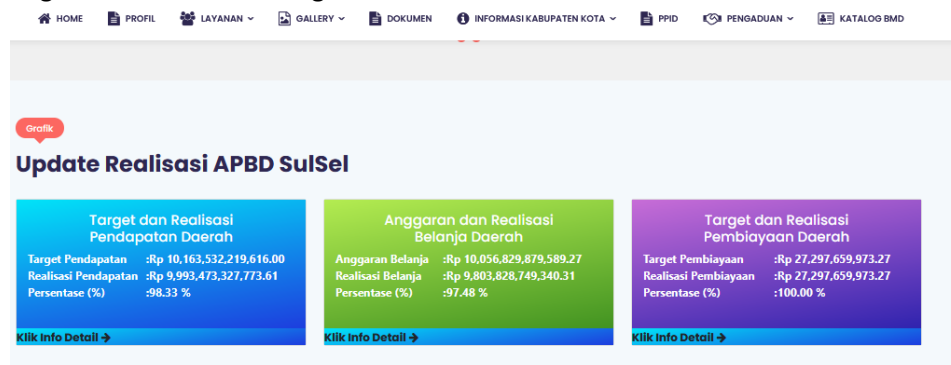
Salah satu tantangan krusial yang sering kali terjadi di berbagai instansi pemerintah daerah adalah tingkat pemanfaatan aplikasi keuangan daerah yang belum optimal. Meskipun sistem informasi keuangan daerah seperti SIMDA Keuangan atau SIPD telah diimplementasikan, dalam praktiknya masih sering dijumpai proses manual yang berjalan paralel atau fitur-fitur sistem yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh staf. Hal ini dapat mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketersediaan *teknologi* dan pemanfaatannya di lapangan. Sebagai contoh faktual, sering kali ditemukan masih banyak pencatatan manual untuk beberapa jenis transaksi, atau adanya input data yang berulang di beberapa sistem yang berbeda, yang tentunya mengurangi efisiensi yang seharusnya diperoleh dari digitalisasi. Di samping itu, keterbatasan infrastruktur jaringan dan perangkat keras juga menjadi hambatan signifikan dalam mempercepat implementasi *e-government*. Beberapa unit kerja atau pegawai kerap menghadapi kendala akses internet yang lambat, keterbatasan jumlah komputer yang memadai, atau spesifikasi perangkat yang sudah usang. Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi operasional *e-government* yang sangat bergantung pada konektivitas dan *hardware* yang andal. Secara faktual, keluhan pegawai tentang kecepatan internet yang tidak stabil, printer yang sering macet, atau komputer yang sering "hang" merupakan indikasi nyata dari permasalahan infrastruktur yang belum memadai.

Di samping itu, keterbatasan infrastruktur jaringan dan perangkat keras juga menjadi hambatan signifikan dalam mempercepat implementasi *e-government*. Beberapa unit kerja atau pegawai kerap menghadapi kendala akses internet yang lambat, keterbatasan jumlah komputer yang memadai, atau spesifikasi perangkat yang sudah usang. Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi operasional *e-government* yang sangat bergantung pada konektivitas dan *hardware* yang andal. Secara faktual, keluhan pegawai tentang kecepatan internet yang tidak stabil, printer yang sering macet, atau komputer yang sering "hang" merupakan indikasi nyata dari permasalahan infrastruktur yang belum memadai. Lebih lanjut, tantangan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penentu keberhasilan *e-government* yang tidak bisa diabaikan. Wawancara KemenPAN-RB pada tahun 2020 juga mengidentifikasi bahwa kualitas SDM yang belum optimal menjadi salah satu permasalahan utama dalam

digitalisasi pemerintahan (41%) di samping isu interoperabilitas sistem, infrastruktur TIK, dan keterbatasan anggaran. Meskipun program pelatihan mungkin sudah diselenggarakan, sebagian pegawai masih memiliki literasi digital yang rendah atau merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem baru. Ada pula kemungkinan kurangnya tenaga ahli IT yang memadai untuk mendukung operasional sistem secara berkelanjutan. Secara faktual di lapangan, masih banyak pegawai senior yang lebih nyaman dengan cara kerja manual, kurangnya antusiasme dalam mengikuti pelatihan teknologi, atau seringnya terjadi kesalahan input data yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap sistem yang digunakan.

Kondisi-kondisi ini secara tidak langsung menggarisbawahi pentingnya upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam memperkuat implementasi *e-government*, khususnya pada level perangkat daerah seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kurangnya kualitas SDM dan minimnya layanan yang terintegrasi menunjukkan bahwa transformasi digital dalam birokrasi publik belum sepenuhnya optimal dan terstruktur. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkenalkan sistem informasi berbasis *website* yakni bkad.sulselprov.go.id yang diperuntukkan bagi pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan administrasi. Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 dan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokratisasi.

Implementasi *e-government* di BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kemajuan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui sistem digital, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakses informasi terkait target dan realisasi keuangan secara *real time*. Hal ini tercermin dengan adanya keterbukaan informasi publik melalui penyajian data keuangan daerah yang dapat diakses secara digital oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Berikut tampilan pada *website* bkad.sulselprov.go.id terkait target dan realisasi keuangan secara *real time*:



Gambar 1 Tampilan Website BPKAD

Sumber : Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data terkini yang ditampilkan dalam sistem informasi digital BPKAD Sulsel, terlihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp9.993.473.327.773,61 atau sebesar 98,33% dari target Rp10.163.532.219.616,00. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp9.803.828.749.340,31 atau 97,48% dari anggaran Rp10.056.829.879.589,27. Adapun realisasi Pembiayaan Daerah tercatat 100% dari target yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp27.297.659.973,27.

Data ini menunjukkan bahwa dari sisi transparansi dan akuntabilitas, penggunaan sistem elektronik telah berperan dalam meningkatkan efisiensi pelaporan dan monitoring keuangan daerah. Menurut Djabbari, dkk (2024), pengembangan sistem informasi berbasis *web* adalah solusi efektif untuk meningkatkan pelayanan publik, memungkinkan masyarakat mengakses

layanan secara *online* dengan mudah, cepat, dan transparan.

Penelitian terdahulu oleh A. Saragih, S., et al. (2023) yang berjudul 'Evaluasi Kesiapan Implementasi *E-government* di Pemerintah Daerah: Studi pada Dinas Kominfo Kabupaten Sleman' menemukan bahwa infrastruktur dan kompetensi SDM merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi dan relevansinya dalam memberikan kerangka dasar penilaian kesiapan implementasi. Sejalan dengan hal tersebut, Virnandes et al. (2024) dalam studinya '*Building Public Trust Through Digital Government Transformation: A Qualitative Study Of Indonesian Civil Service Agents*' mengeksplorasi bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik melalui transformasi pemerintahan digital (DGT). Penelitian ini menguraikan bahwa kapabilitas digital, tata kelola, kepemimpinan, kemitraan organisasi, karakteristik negara, lingkungan kolaboratif, dukungan keuangan, dan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap DGT dalam membangun kepercayaan warga negara. Pada penelitian ini, terdapat unsur kebaruan yaitu penelitian dilakukan di BPKAD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus eksklusif pada penilaian kesiapan implementasi e-government dari perspektif internal instansi. penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan menyediakan analisis mendalam mengenai kesiapan e-government pada instansi keuangan daerah di tingkat provinsi, yang secara spesifik belum diteliti oleh studi-studi terdahulu. Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan pengetahuan ini dengan menganalisis "Kesiapan Implementasi E-government Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan".

2. Literature Review

Administrasi Publik

Administrasi publik adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana pemerintah melakukan tugas dan fungsinya dengan cara yang efektif dan efisien. Kursus ini tidak hanya membahas struktur organisasi pemerintahan; itu juga mencakup proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan bagaimana negara dan masyarakat berinteraksi satu sama lain. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan publik dilaksanakan dengan cara terbaik untuk kepentingan umum. Administrasi publik adalah proses manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik melalui aktivitas organisasi dan hubungan yang terbentuk antara aparatur negara dan warga (Rosenbloom, 2021). Secara umum, gagasan tentang administrasi publik berkembang seiring dengan perubahan di seluruh dunia, seperti globalisasi, krisis iklim, revolusi digital, dan tantangan setelah pandemi. Birokrasi digital sekarang lebih terbuka, bekerja sama, dan adaptif daripada birokrasi tradisional yang cenderung hierarkis. Administrasi publik tidak lagi terbatas pada aturan formal dan struktur organisasi. Fokusnya sekarang adalah pada pembentukan tata kelola yang inklusif, fleksibel, dan berorientasi pada pencapaian hasil kebijakan secara nyata.

Teori Kapabilitas Dinamis (Dynamic Capabilities Theory)

Menurut Teece et al., (1997) kapabilitas dinamis sebagai kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan, membangun, dan mengonfigurasi ulang kompetensi internal dan eksternal untuk mengatasi perubahan lingkungan yang cepat. Teori Kapabilitas Dinamis (Teece et al., 1997) memberikan dasar konseptual untuk memahami bagaimana lembaga sektor publik dapat membangun kemampuan strategis dalam menghadapi perubahan tersebut secara berkelanjutan. Dalam konteks *e-government*, kapabilitas dinamis berarti kemampuan instansi pemerintah untuk:

- a. Merasakan kebutuhan perubahan dan peluang teknologi.
- b. Merebut peluang tersebut dengan mengadopsi teknologi baru.
- c. Mentransformasi proses bisnis dan struktur organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi.

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior/TPB)

Teori Perilaku Terencana atau *Theory of Planned Behavior (TPB)*, yang diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1991, merupakan model konseptual yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sikap individu dan perilaku aktual yang ditampilkan. TPB menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat diprediksi secara akurat melalui niat (*intention*) yang dimilikinya, dan niat tersebut dibentuk oleh tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Afrizal dan rekan-rekan (2024) mengombinasikan teori TPB dengan kerangka kerja dari model TAM dan UTAUT untuk menelaah perilaku masyarakat dalam mengakses layanan digital pemerintah. Temuan mereka menunjukkan bahwa ketiga komponen utama dalam TPB yakni sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh secara signifikan terhadap niat pengguna dalam memanfaatkan layanan tersebut. Maka dari itu, TPB dapat dijadikan sebagai landasan teoritis yang kuat dalam mengevaluasi berbagai aspek psikologis dan sosial yang memengaruhi pembentukan niat dan perilaku individu.

Konsep E-government

Secara umum, *e-government* dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Darmawan et al., 2020:3). *E-government* atau pemerintahan elektronik, salah satu inisiatif yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi ini guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penerapan *E-government* diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan administratif dan pelayanan yang selama ini dihadapi. Penerapan *E-government* mencakup berbagai aspek, mulai dari digitalisasi proses administrasi hingga penyediaan layanan publik secara *online* (Rifdan et al., 2024). Konsep *e-government* juga sangat berguna untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance*, sehingga keadaan dapat menjadikan *e-government* mempertunjukkan peranan penting dalam modernisasi pemerintahan (Kausar et al., 2022).

3. Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis tingkat kesiapan implementasi e-government pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi aktual implementasi e-government dari perspektif internal organisasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman terhadap implementasi e-government, terdiri dari pegawai BPKAD, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna layanan BPKAD. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan. Objek penelitiannya adalah kepala badan, sekretariat dan masing – masing bidang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. Results and Discussions

Deskripsi Data Analisis Hasil Penelitian

Berikut ini disajikan deskripsi data serta hasil analisis data penelitian yang telah diperoleh dari informan atas pertanyaan yang telah disusun dan dikonfirmasi kepada 9 Informan yang ada dalam penelitian ini yang terdiri dari 3 pegawai dari BPKAD, 5 Informan dari OPD lain dan 1 Informan dari DISKOMINFO. Dari sembilan indikator pertanyaan yang diajukan

berikut tanggapan para pegawai:

Konektivitas ICT

Kemampuan sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun hubungan antar perangkat, aplikasi, dan instansi agar dapat saling bertukar data dan informasi secara efektif, cepat, dan aman dikenal sebagai konektivitas ICT (Information and Communication Technology). Konektivitas ICT sangat penting untuk mengintegrasikan layanan digital antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BPKAD menggunakan beberapa aplikasi utama yang telah terintegrasi, inti dari operasional yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan secara nasional untuk melakukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. SIMBADA atau sistem serupa untuk mengelola dan menata usahakan seluruh Barang Milik Daerah dan aplikasi E-Revenue untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah baik berupa pajak dan retribusi. Konektivitas ICT tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan jaringan internet; itu juga mencakup hal-hal seperti kualitas jaringan, kapasitas bandwidth, kestabilan koneksi, interoperabilitas sistem antar instansi, dan koordinasi teknis antara pengelola sistem dan pengguna layanan. Digitalisasi layanan publik tidak dapat berjalan dengan baik tanpa konektivitas yang baik.

Hubungan jaringan yang saling terintegrasi antar instansi pemerintah daerah diperlukan untuk menerapkan *e-government*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar instansi telah memiliki akses ke jaringan internal, yang terhubung ke jaringan pemerintah daerah yang dikelola oleh Diskominfo. Kualitas koneksi antar instansi mencakup kualitas jaringan yang digunakan (stabilitas koneksi dan kecepatan data). Lokasi dan kapasitas jaringan masing-masing OPD memengaruhi kualitas koneksi. penyedia layanan yang digunakan dan seberapa andal mereka. Luas bandwidth (Mbps) yang disediakan untuk masing-masing OPD berdampak langsung pada kelancaran sistem *online* yang berhubungan dengan keuangan, pelaporan, dan administrasi.

Untuk meningkatkan analisis yang peneliti telah lakukan, peneliti melakukan trigulasi informasi dari tiga sumber utama yaitu dari pihak BPKAD, Pihak Diskominfo, dan OPD Pengguna. Menurut peneliti, ketidakmampuan jaringan untuk menyesuaikan diri dengan peningkatan jumlah pengguna dan data menyebabkan kondisi ini terjadi. Meskipun Diskominfo memantau infrastruktur jaringan secara teratur, peningkatan kapasitas masih bergantung pada anggaran yang tersedia dan kolaborasi dengan penyedia jaringan. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa koneksi ICT pemerintah daerah sudah ada, tetapi belum sepenuhnya optimal. Keunggulan utama adalah ketersediaan jaringan *antar instansi* yang diatur oleh Diskominfo. Namun, kekurangannya termasuk keterbatasan bandwidth di beberapa OPD pengguna dan ketidakstabilan jaringan.

Penggunaan dan Integrasi ICT

Seberapa efektif sistem informasi membantu manajemen pemerintahan, terutama di bidang aset, keuangan, dan pelayanan publik, ditentukan oleh penggunaan dan integrasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) mengacu pada kemampuan sistem dan aplikasi *antar instansi* untuk berinteraksi satu sama lain, berbagi data, dan meningkatkan koordinasi digital antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam konteks *e-government*, integrasi ICT menjadi dasar untuk interoperabilitas sistem, yang memungkinkan unit lain untuk menggunakan data dari satu unit kerja secara aman, cepat, dan efisien tanpa melakukan proses manual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sesuai dengan Model Tahapan Kematangan *E-government*, BPKAD telah mencapai tingkat digitalisasi dan integrasi yang baik. Pihak BPKAD dan Diskominfo mengakui penggunaan berbagai aplikasi (SIPD, SIMAKDA, dll.) dan menyatakan

bahwa sistem telah terintegrasi sepenuhnya karena sangat penting untuk diaplikasikan fungsinya.

Namun, OPD pengguna lainnya memperjelas klaim ini secara signifikan, mereka mengakui bahwa hubungan hanya terbatas pada modul-modul penting (SPP/SP2D), tetapi mengatakan bahwa masih perlu memasukkan data secara manual. Perbedaan ini menunjukkan bahwa integrasi TIK hanya bersifat parsial dan tidak memenuhi prinsip interoperabilitas TIK. Keluhan tentang "perbedaan format data" memperkuat hambatan interoperabilitas ini, yang mencegah data bergerak secara otomatis antar sistem.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintah. Berbagai aplikasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berinteraksi satu sama lain, bertukar data, dan mempercepat aliran data lintas bidang berkat integrasi sistem. Ini membentuk dasar untuk *e-government* dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD dan OPD pengguna secara luas menggunakan sistem informasi keuangan dan aset daerah. Pemanfaatannya membantu tetapi belum sepenuhnya optimal. Ini menunjukkan bahwa ada kendala teknis atau adaptasi pegawai terhadap aplikasi tertentu seperti SIPD, SIMAKDA, dan SIMBADA.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ICT di pemerintahan daerah telah berjalan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya merata. Karena penggunaan sistem digital telah meningkatkan efisiensi kerja dan mempercepat proses pelaporan, perlu ada peningkatan pelatihan teknis, perluasan bandwidth, dan penyempurnaan interoperabilitas antar-sistem agar semua OPD dapat merasakan manfaat digitalisasi secara menyeluruh. Teori menekankan betapa efektifnya sistem informasi dalam membantu manajemen aset dan keuangan pemerintah. Menurut teori, tujuan utama penggunaan sistem informasi efisiensi, pencatatan, dan pelaporan telah dicapai. Ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun memenuhi persyaratan dasar *e-government*.

Pelatihan

Pelatihan teknologi informasi (TIK) adalah proses strategis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan memastikan keberhasilan SPBE. Kesuksesan SPBE bergantung pada tenaga kerja yang berpengalaman dalam mengoperasikan teknologi yang digunakan. Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah diterima oleh pegawai di pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan pada tiga bentuk pelatihan yang mendukung *e-government* di antaranya pelatihan mengenai pengoperasian aplikasi keuangan dan aset daerah seperti SIPD dan SIMAKDA, penguatan kompetensi teknis TIK termasuk jaringan dan keamanan data serta administrasi perkantoran digital seperti smart office dan surat menyurat digital.

Dari hasil analisis triangulasi, terdapat kesenjangan kompetensi dalam pengelolaan TIK di Pemprov. Sulsel. Baik BPKAD maupun OPD setuju bahwa pelatihan yang efektif menghasilkan antusiasme tinggi di antara karyawan. Ini memvalidasi Teori Keterkaitan Pelatihan dan Kinerja (Training and Performance Linkage). Namun, masalah kelembagaan dan anggaran menghambat efektivitas ini. Dua dari tiga informan BPKAD dan Diskominfo setuju bahwa pelatihan sangat kurang dilakukan karena anggaran peningkatan SDM yang minim. Situasi ini secara langsung menimbulkan gap kemampuan, terutama karena regulasi dan aplikasi terus berubah.

Selain itu, Diskominfo menekankan masalah struktural yang lebih luas, seperti peningkatan penuh Soft Skill dan penempatan SDM bertalenta digital di setiap OPD. Kualitas pelatihan juga menjadi perhatian, dengan kritik bahwa metode pertemuan virtual yang digunakan "belum efektif" karena keterbatasan waktu, yang menunjukkan bahwa prinsip Model Human-Centered Design tidak diterapkan dalam pelatihan. Secara keseluruhan, tantangan terbesar bagi Pemprov Sulsel tidak lagi terletak pada keinginan untuk sumber daya, tetapi pada

pembagian sumber daya dan peningkatan teknik pelatihan untuk memastikan TIK digunakan secara optimal di seluruh OPD.

Kompetensi SDM sangat penting untuk keberhasilan karena tingginya tuntutan untuk menerapkan *e-government*. Hasil penelitian dari 9 informan tentang indikator pelatihan menunjukkan bahwa keberhasilan dampak lebih besar daripada disparitas akses. Ketersediaan Pelatihan TIK, informan mengatakan bahwa mereka pernah mendapatkan pelatihan atau bahwa pelatihan tersebut dilakukan secara teratur saat ada aplikasi baru, yang menunjukkan komitmen kebijakan. Namun terdapat juga yang menjawab menganggap pelatihan jarang atau Tidak Mendapatkan menunjukkan bahwa program TIK saat ini cenderung reaktif dan tidak berkelanjutan. Ini menunjukkan secara kualitatif bahwa keterbatasan refresher atau pelatihan lanjutan membuat SDM di beberapa OPD rentan terhadap perubahan sistem.

Hasil positif diperkuat oleh komentar fasilitator tentang pelatihan sangat membantu untuk penyelenggaraan layanan elektronik. Ini menunjukkan bahwa pelatihan dianggap sebagai komponen strategis untuk mengurangi risiko implementasi dan memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik di tingkat pengguna akhir. Namun demikian, wawancara mendalam menunjukkan bahwa pelatihan masih menghadapi beberapa tantangan. Ini termasuk waktu yang singkat, materi yang terbatas, dan sedikit tindak lanjut setelah pelatihan. Beberapa OPD menyarankan agar pemerintah daerah membentuk pusat pelatihan digital (pusat pelatihan digital) atau unit bantuan teknis (helpdesk) untuk menyediakan pendampingan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan analisis menunjukkan bahwa pelatihan TIK di tingkat pemerintah daerah telah meningkatkan kemampuan ASN secara signifikan; namun, keberlanjutan dan perbandingan masih perlu diperkuat. Agar proses transformasi digital dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, pemerintah daerah harus menetapkan program pelatihan rutin yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disertai dengan evaluasi kinerja setelah pelatihan.

Kapasitas SDM

Keberhasilan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) bergantung pada kapasitas sumber daya manusia (SDM). Digitalisasi sangat bergantung pada kemampuan, sikap, dan kesiapan aparatur dalam mengoperasikan dan memelihara sistem yang ada. Kapasitas SDM mencakup kemampuan teknis (technical skills), kemampuan analitis, dan pemahaman tentang kebijakan digital dan tata kelola data. Karena proses keuangan dan administrasi daerah sebagian besar dilakukan secara digital melalui aplikasi seperti SIPD, SIMAKDA, dan SIMBADA, kapasitas SDM sangat penting dalam BPKAD dan OPD pengguna. Oleh karena itu, memahami sistem informasi keuangan, mengelola data digital, dan menjaga data aman sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan *e-government*.

Untuk memastikan keberhasilan SPBE, kapasitas SDM mencakup kemampuan teknis, kemampuan analitis, sikap, dan kesiapan aparatur untuk mengoperasikan dan memelihara sistem. Kesuksesan SPBE sangat bergantung pada sikap, kemampuan, dan kesiapan personel untuk menjalankan dan memelihara sistem. Keberhasilan *e-government* bergantung pada pemahaman sistem informasi, manajemen data digital, dan perlindungan data aman.

Deksripsi hasil penelitian yang peneliti lakukan, kapasitas sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara umum dianggap baik dan mampu menyesuaikan diri dengan penerapan sistem digital. Informan yang menjawab menganggapi pegawai sangat mampu dalam menjalankan aplikasi keuangan dan administrasi, sedangkan terdapat menganggapnya cukup mampu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki keterampilan TIK dasar yang cukup untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan secara elektronik. Namun masih terdapat pegawai dianggap kurang mampu, terutama di bagian administratif yang belum terbiasa dengan beberapa sistem aplikasi.

Perbedaan kemampuan ini terutama disebabkan oleh usia, pendidikan non-teknologi,

dan kurangnya pelatihan. Dalam hal kesiapan untuk menghadapi perubahan sistem digital baru, mayoritas informan menyatakan bahwa mereka sangat siap, dan siap untuk beradaptasi. Ini menunjukkan bahwa ASN terbuka dan bersemangat untuk inovasi teknologi. Sebaliknya, karena tergantung pada pegawai lain yang lebih mahir dalam TIK, maka ada yang mengatakan bahwa mereka tidak siap.

Selain itu, sangat penting bahwa tenaga teknis TIK tersedia di tiap instansi. Hasil analisis umumnya menunjukkan bahwa kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan *e-government* sudah baik, tetapi tidak merata. Rotasi pegawai berbasis kompetensi, mentoring internal, dan sistem pendampingan teknis adalah semua cara yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas staf.

Menurut teori, kapasitas sumber daya manusia termasuk kemampuan untuk melakukan analisis dan menjaga data aman. Karena personel teknis yang terbatas, kapasitas SDM yang ada belum sepenuhnya siap untuk menangani aspek tata kelola data dan keamanan data yang kompleks, yang merupakan kunci keberhasilan *e-government* jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan SDM sudah bergeser dari kemampuan dasar mengoperasikan aplikasi ke kemampuan strategis mengamankan dan mengembangkan sistem. Ini menunjukkan kebutuhan akan kompetensi khusus yang ditekankan oleh Diskominfo (keamanan data, manajemen server).

Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peraturan dan kebijakan pemerintah memberikan dasar hukum dan garis besar strategis. Sejauh mana teknologi informasi dapat digunakan untuk pelayanan publik, koordinasi antar-organisasi perangkat daerah, dan pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada adanya peraturan yang jelas, terstruktur, dan konsisten. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE adalah dasar untuk kebijakan digitalisasi pemerintah daerah, yang kemudian diterapkan melalui peraturan gubernur, surat edaran, dan pedoman teknis yang dibuat oleh Diskominfo dan BPKAD. Peraturan ini menekankan pentingnya integrasi sistem informasi, efisiensi data, dan keamanan siber sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan modern.

Sejauh mana implementasi kebijakan di lapangan dapat dinilai dengan melihat konsistensi penerapan kebijakan, pemahaman pegawai tentang regulasi digital, dan kepatuhan terhadap pedoman SPBE. Untuk memastikan integrasi, efisiensi, dan keamanan siber, peraturan dan kebijakan memberikan dasar hukum dan garis besar strategis untuk penerapan SPBE. Penilaian bergantung pada konsistensi penerapan kebijakan, pemahaman pegawai tentang regulasi digital, dan kepatuhan terhadap pedoman SPBE. Agar teknologi informasi dapat digunakan secara optimal, peraturan harus jelas, terorganisir, dan konsisten. Untuk meningkatkan hasil penelitian, peneliti triangulasi data dari tiga sumber utama: BPKAD, Diskominfo, dan OPD Pengguna Lainnya.

Namun, ada tren positif dalam pemahaman pegawai tentang kebijakan digitalisasi, pegawai memahami isi kebijakan dengan baik, dan beberapa cukup memahaminya. Terdapat pegawai mengatakan mereka belum memahami sepenuhnya aturan dan mekanisme penerapan sistem digital. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan bimbingan teknis tentang kebijakan masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kerangka kebijakan dan regulasi daerah telah mendukung pelaksanaan SPBE; namun, agar kebijakan yang telah dibuat dapat diterapkan secara efektif di seluruh satuan kerja, koordinasi lintas OPD dan peningkatan pemahaman aparatur masih diperlukan.

Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sangat mendukung pelaksanaan SPBE (sesuai dengan tuntutan teori adanya dasar hukum), tetapi ada masalah besar dalam sinkronisasi dan pemahaman teknis. Terdapatnya konflik dan perubahan cepat dalam regulasi pusat menyebabkan inkonsistensi dan hambatan birokrasi dalam proses

digital. Salah satu contohnya adalah kebutuhan untuk memeriksa aturan antara kementerian dan pusat. Meskipun ada kerangka kebijakan, pemahaman teknis operasional di tingkat ASN masih lemah. Kebingungan dalam prosedur disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang intensif dan pedoman teknis yang jelas, yang menghambat penerapan SPBE secara konsisten. Oleh karena itu, meskipun fondasi hukum sudah kuat, pemerintah daerah harus berkonsentrasi pada penyederhanaan dan sinkronisasi regulasi operasional antar-OPD serta meningkatkan sosialisasi dan pelatihan regulasi untuk memastikan kebijakan SPBE diterapkan dan dipahami secara luas.

Infrastruktur

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT) adalah inti dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Infrastruktur ini terdiri dari berbagai bagian fisik dan digital, seperti perangkat lunak, pusat data (pusat data), jaringan komunikasi, perangkat keras seperti server, komputer, jaringan dan dukungan listrik yang stabil. Sejauh mana kegiatan pemerintahan dapat berjalan secara digital dengan efektif, efisien, dan terintegrasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Infrastruktur yang baik memungkinkan konektivitas antar-OPD, proses pertukaran data yang lebih cepat, dan gangguan sistem yang minimal. Sebaliknya, infrastruktur yang tidak memadai dapat menyebabkan proses administrasi yang tertunda, masalah dengan penggunaan aplikasi, dan penurunan produktivitas kerja pegawai. Oleh karena itu, dalam proses transformasi digital pemerintahan daerah, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ICT yang terencana dan berkelanjutan merupakan komponen penting dari rencana tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar OPD memiliki infrastruktur dasar yang cukup baik, tetapi masih ada perbedaan kualitas antar instansi. Beberapa OPD memiliki fasilitas jaringan dan perangkat modern, sementara yang lain masih menggunakan perangkat lama dengan kapasitas terbatas. Untuk meningkatkan hasil penelitian, peneliti melakukan triangulasi data dari tiga sumber utama: BPKAD, Diskominfo, dan OPD Pengguna Lainnya.

Namun demikian, terdapat gap yang menghambat penggunaan SPBE sepenuhnya. Pertama, masalah perangkat keras (hardware): BPKAD dan OPD pengguna menunjukkan bahwa banyak komputer dan server sudah tua dan tidak dapat menjalankan aplikasi kontemporer seperti SIPD. Ini menyebabkan sistem menjadi lambat dan membutuhkan penambahan PC atau laptop segera dan pembaruan perangkat keras. Kedua, masalah jaringan dan kecepatan sistem. Jaringan sering putus, "turun," atau kewalahan karena beban kerja yang tinggi. Pengguna mengalami masalah terbesar karena akses server pusat yang lambat dan lamban, yang menghambat proses digital. Selain itu, Diskominfo mengakui bahwa OPD yang jauh dari pusat kota menghadapi masalah koneksi dan keterbatasan akses. Ketiga, kekurangan fasilitas cadangan dan dukungan anggaran yang optimal: BPKAD melaporkan bahwa tidak ada fasilitas cadangan atau *backup*, dan semua pihak setuju bahwa untuk meningkatkan infrastruktur dan sistem untuk mencapai tingkat kinerja terbaik, diperlukan biaya tambahan atau anggaran yang lebih besar.

Hal ini telah sejalan dengan Teori siklus Hidup Aset(Asset Life Cycle Theory) yang menyatakan bahwa setiap aset TIK (perangkat keras) memiliki siklus hidup yang terbatas. Setelah mencapai akhir siklusnya (*end-of-life*), kinerja aset menurun secara drastis (*obsolescence*), dan biaya *maintenance* meningkat. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur ICT pemerintah daerah telah berkembang dengan baik, tetapi beberapa OPD memerlukan perbaikan dan pemerataan. Untuk meningkatkan keberlanjutan digitalisasi, pemerintah daerah perlu melakukan hal-hal berikut: pemeriksaan rutin infrastruktur ICT, Perluasan fiber optik dan peningkatan bandwidth jaringan, Penyediaan perangkat cadangan serta sumber daya listrik stabil (UPS), serta dengan program pembaruan lima tahunan, peralatan harus dimodernisasi.

Keamanan Akses

Salah satu komponen penting dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah keamanan akses ICT (Information and Communication Technology). Keamanan ini mencakup upaya untuk melindungi sistem, data, dan jaringan dari ancaman internal dan eksternal seperti peretasan, kebocoran data, dan penyalahgunaan akses oleh pihak yang tidak berwenang. Kerahasiaan (kerahasiaan), integritas (integritas), dan ketersediaan (ketersediaan) informasi adalah prinsip utama keamanan akses. Keamanan mencakup upaya untuk melindungi sistem, data, dan jaringan berdasarkan prinsip Kerahasiaan, Integritas, dan Ketersediaan. Komponen keamanan termasuk keamanan jaringan, manajemen kata sandi, otorisasi pengguna, dan sistem backup data. Keamanan akses harus diterapkan, dan karyawan harus dididik tentang pentingnya menjaga keamanan data.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan menunjukkan bahwa sistem keamanan akses ICT di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah diterapkan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kelemahan teknis dan perilaku pengguna. Terdapat informan mengatakan bahwa sistem keamanan telah diterapkan dengan baik, terutama dengan menggunakan akun pribadi (username dan password) untuk setiap pengguna aplikasi, untuk sistem keamanan baru diterapkan sebagian, kesadaran pegawai terhadap keamanan data digital yang cukup positif. Informan menunjukkan bahwa ada kepedulian terhadap keamanan sistem dan terdapat yang menunjukkan kesadaran yang lebih rendah, terutama terkait dengan praktik keamanan dasar seperti penggunaan sandi yang buruk atau penyimpanan data di perangkat pribadi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintah daerah telah menerapkan keamanan akses ICT, tetapi disiplin pengguna dan manajemen keamanan data masih menjadi masalah. Pemerintah daerah direkomendasikan untuk: mengikuti semua prosedur operasional prosedur (SOP) keamanan ICT, Melakukan audit keamanan data rutin, pelatihan keamanan siber untuk ASN dan memastikan bahwa backup data otomatis berada di server Diskominfo.

Teori menekankan bahwa kesadaran karyawan harus ditingkatkan melalui pelatihan dan sosialisasi yang konsisten. Faktor manusia, seperti kesalahan manusia atau kelalaian, merupakan ancaman terbesar terhadap keamanan akses. Hal ini bertentangan dengan sifat data yang strategis dan rahasia. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang teratur dan mendalam (seperti yang ditunjukkan data) menyebabkan rendahnya kesadaran etika dan risiko data. Ini meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan dan kebocoran data oleh pihak yang tidak berwenang.

Aplikasi dan Layanan

Aplikasi dan layanan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) adalah instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*). Aplikasi pemerintahan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat layanan publik. Sistem keuangan daerah, manajemen aset, arsip elektronik, surat menyurat digital, dan sistem pelaporan terpadu antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah beberapa layanan yang ditawarkan.

Hasil triangulasi ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi pemerintahan daerah telah didukung dengan baik oleh aplikasi dan layanan ICT. Namun, diperlukan peningkatan dalam hal stabilitas sistem, pemanfaatan fitur, dan ketersediaan layanan dukungan teknis.

Analisis ini didukung oleh teori Model Penerimaan Teknologi (TAM) dan prinsip tata kelola digital. Peningkatan penilaian aplikasi pada aspek sangat mudah dipahami dan sangat membantu memvalidasi dua konstruksi utama TAM: Persepsi Kemudahan Penggunaan (Persepsi Kemudahan Penggunaan) dan Persepsi Manfaat (Persepsi Manfaat), yang berkontribusi pada tingginya adopsi awal aplikasi. Selain itu, temuan ini mendukung teori bahwa keberhasilan

sistem digital pemerintah (sesuai standar SPBE) sangat bergantung pada kemampuan dan kesiapan karyawan. Keluhan BPKAD tentang kurangnya penggunaan fitur penuh karena kurangnya pelatihan dan keluhan Diskominfo tentang kurangnya operator spesialis memperkuat tesis bahwa kesiapan karyawan merupakan prasyarat utama untuk mencapai potensi manfaat maksimal dari sebuah aplikasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi dan layanan ICT telah menjadi inti dari operasional *e-government* di tingkat daerah. Aplikasi keuangan, aset, dan administrasi yang terintegrasi *antar instansi* telah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Namun, untuk mencapai kinerja digital yang optimal, diperlukan peningkatan seperti: Peningkatan kapasitas dan bandwidth server, Optimalisasi fitur dan integrasi lintas sistem aplikasi, penyediaan dukungan teknis permanen di setiap OPD, selain Pelatihan khusus untuk operator aplikasi.

Akses Informasi

Salah satu elemen penting dalam penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) adalah akses informasi. Prinsip utama *e-government* adalah memastikan bahwa data dan informasi publik dapat diakses secara cepat, tepat, dan transparan oleh pihak internal pemerintah dan masyarakat luas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan lebih baik, akuntabilitas akan meningkat, dan pengambilan keputusan akan lebih cepat. Akses informasi untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencakup tidak hanya ketersediaan data digital di tempat kerja tetapi juga kemampuan sistem untuk menyampaikan informasi secara real-time melalui portal pemerintah daerah, aplikasi keuangan, dan sistem manajemen dokumen. Kecepatan, keterbukaan, kemudahan penggunaan, dan keamanan data yang diakses adalah faktor-faktor yang menentukan kualitas akses informasi.

Akses data harus cepat, akurat, dan jelas. Faktor yang menentukan kualitas adalah kecepatan, transparansi, dan kemudahan penggunaan. Prinsip utama *e-government* adalah memastikan bahwa data dan informasi publik dapat diakses secara cepat, tepat, dan transparan oleh pihak internal dan masyarakat luas. Tingkat kewenangan harus menentukan kualitas akses, dan keamanan data yang diakses menentukan kualitas akses.

Kecepatan dan kelancaran akses data dinilai oleh informan sangat cepat dan lancar dan sebagian menilainya cukup cepat; dan ada yang menilainya lambat. Meskipun sebagian besar OPD menikmati kecepatan akses yang baik, masih ada beberapa instansi yang menghadapi masalah teknis, terutama selama jam kerja sibuk atau selama proses sinkronisasi data. Dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi internal, informan menilai sangat transparan, dan menilai cukup transparan, menunjukkan bahwa sistem digital telah meningkatkan keterbukaan antar unit kerja dan mengurangi ketergantungan pada dokumen manual. Namun beberapa informan menilai bahwa beberapa informasi masih belum sepenuhnya terbuka, terutama pada sistem yang melibatkan pembagian kewenangan antar bidang.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa akses informasi di pemerintahan daerah cukup baik, jelas, dan membantu produktivitas. Namun, pemerintah daerah harus mengambil tindakan strategis seperti: agar sistem ini berjalan lebih baik dan merata. Meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan, Menyempurnakan sistem yang memungkinkan pembaruan data secara real-time, menciptakan pengendalian akses berbasis peran (pengendalian akses berbasis peran), dan mengembangkan portal informasi publik terpadu yang, sesuai dengan tingkat kewenangannya, dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan instansi. Upaya ini akan meningkatkan transparansi tata kelola data, meningkatkan efisiensi operasi lintas lembaga, dan mempercepat pencapaian tujuan digitalisasi pemerintahan yang berfokus pada pelayanan publik yang modern, terbuka, dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD telah mempersiapkan diri dengan baik

untuk pilar pertama dan keempat. Namun, ia masih menghadapi masalah terkait aspek SDM dan kebijakan regulasi yang belum sepenuhnya sinkron. Hal ini mendukung pandangan Indrajit bahwa keberhasilan *e-government* bergantung pada ketersediaan kedua teknologi dan sumber daya manusia dan kelembagaan. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan model E-Readiness Framework dari Center for International Development (CID) di Harvard University, yang menekankan bahwa kesiapan *e-government* ditentukan oleh tiga dimensi utama: infrastruktur ICT, lingkungan politik, dan sumber daya manusia. Hasil analisis menunjukkan bahwa BPKAD memiliki infrastruktur dan aplikasi yang memadai, tetapi diperlukan peningkatan dalam dimensi human capital (melalui pelatihan dan penguatan SDM untuk meningkatkan kapasitas dan kapasitas sumber daya manusia). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan *e-government* BPKAD masih berada di tahap persiapan transisi; itu telah bergerak dari tahap adopsi ke tahap integrasi, tetapi masih belum mencapai tahap transformasi digital sepenuhnya.

Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Wibowo & Astuti (2019), yang menemukan bahwa masalah utama dalam menerapkan *e-government* di tingkat daerah tidak terletak pada ketersediaan aplikasi; itu lebih pada koordinasi *antar instansi*, infrastruktur jaringan, dan sumber daya manusia. Akibatnya, temuan penelitian ini tidak hanya konsisten dengan teori, tetapi juga meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana alignment governance dan digital leadership penting untuk memastikan bahwa *e-government* dapat diterapkan secara berkelanjutan.

5. Conclusion

Dalam hal kesiapan implementasi *e-government* pada BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam kategori cukup siap, tetapi belum optimal. Aplikasi inti (SIMAKDA, SIPD, dan SIMBADA) dan keterbukaan informasi publik telah membangun fondasi digital, tetapi masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki segera. Keunggulan utama terletak pada implementasi aplikasi dan layanan digital yang mudah digunakan, keterbukaan informasi publik melalui portal dan *website* resmi SIPD, dukungan fleksibel untuk staf non-IT, dan keinginan besar untuk mengikuti pelatihan ICT. Hambatan utama termasuk kebijakan yang tidak konsisten antara pemerintah pusat dan daerah, jumlah tenaga IT yang terbatas, stabilitas jaringan yang tidak merata dalam OPD, dan sistem keamanan data yang masih bergantung pada *username* dan *password*. Problem-problem ini menyebabkan penurunan efisiensi integrasi data, penundaan layanan publik digital, risiko keamanan siber, dan kendala dalam menjaga keberlanjutan layanan. Oleh karena itu, untuk mencapai standar pemerintahan digital yang efisien, aman, dan berkelanjutan, kesiapan *e-government* BPKAD harus diperkuat.

References

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Al- Kausar, S., Said, M. M., & Sekarsari, R. W. (2022). E-Readiness Dalam Penerapan *Online Single Submission* (OSS) Di Kota Malang (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 14(8), 26–34.
- Darmawan Napitupulu dkk. (2020). *E-government: Implementasi, Strategi, dan Inovasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Data Aplikasi K/L dan Pemda*. Jakarta: Kominfo.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). *Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020*. Jakarta: KemenPAN-RB.

Rifdan, Haerul, Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2024). Analisis penerapan *e-government* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan Tallo kota makassar. *Jurnal Governance and Politik (JPG)*, 4, 49–61.